

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**RENCANA KERJA**  
**AKHIR**  
**(RENJA)**  
**TA. 2019**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Izin-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 telah selesai disusun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal,

2019

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ENCEP JARKASIH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19701201 199009 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB.I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu Dan Capaian Renstra BKPSDM .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM .....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
<b>BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH</b> .....	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM .....	34
3.3 Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM</b> .....	43
<b>BAB. V PENUTUP</b> .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun .....	36

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggung jawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kab.Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar – benar tepat guna dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 untuk bahan penyusunan

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun menggunakan pendekatan system management strategi (Strategi Mangement) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Daerah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam Proses penyusunan Renja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VI Tentang Tahapan dan Tata Cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.4 Program dan Kegiatan

## **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM**

## **BAB. V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJABKPSDM TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM**

Pada Tahun 2017 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 3 Program antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017.**

No	Kegiatan	Out come	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dana yang dibutuhkan	- Jumlah Peserta Diklat Fungsional, Teknis dan Manajemen dan Lainnya (5 Orang)	1 Orang	20,00
			- Jumlah SK Tugas Belajar (20 Tugas Belajar)	17 Tugas Belajar	85.00
			- Jumlah SK Izin Belajar (30 Izin Belajar)	15 Izin Belajar	50.00
			- Jumlah peserta Pembekalan Jabatan Tinggi Pratama	34 Orang	100,00

2.	Penyusunan Data InformasiKepegawai an	Jumlah Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Bezetting Formasi PNS (10Buku)</li> <li>• Jumlah Struktur Organisasi (10 Buku)</li> <li>• Jumlah DUK Kabupaten (10 Buku).</li> </ul>	0 Buku	0
3.	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Jabung Barat.	Jumlah Dana	Jumlah Kasus Indisipliner dan PNS yang terkait masalah hukum (5 Kasus)	9 kasus	100,00
4.	Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat	Jumlah Dana	Pelaksanaan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat (200 Orang)	453 Orang	100,00
5.	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemetaan Jabatan Struktural	Jumlah Dana yang dibutuhkan	• Terlaksananya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka (37Org)	37 Org	100.00
6.	Pendidikan Prajabatan dan III	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Jumlah Peserta Prajabatan CPNSD Golongan II dan III (94 Org)	93 Org	98.94

7.	Peringatan Pegawai Indonesia	Korps Republik	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri(100%)	100%	100,00
8.	Fasilitas Bantuan bagi KORPRI dan LKBH KORPRI	Konsultasi Hukum Anggota	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Terlaksananya Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI (3 Kasus)	8 kasus	100.00

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Kegiatan berkisar rata-rata 94,25% dimana ini berdasarkan realisasi capaian terakhir pada triwulan ke IV. Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) diatas menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan pada tahun 2017 telah memenuhi target.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/ program/ sasaran strategis akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.312.904.300 dengan realisasi sebesar Rp. 3.099.205.075 atau rincian Anggaran dan Realisasi perkegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Anggaran : Rp. 3.732.000
  - Realisasi : Rp. 3.132.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan : 83.92%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 83.92%
  
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Anggaran : Rp. 64.700.000
  - Realisasi : Rp. 62.015.385

- Prosentase Realisasi Keuangan : 95.85%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 95.85%
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Anggaran : Rp. 86.080.000
  - Realisasi : Rp.81.080.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :94.19%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 94.19%
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Anggaran : Rp. 28.832.170
  - Realisasi : Rp. 27.513.250
  - Prosentase Realisasi Keuangan :95.43%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 95.43%
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Anggaran : Rp. 88.781.400
  - Realisasi : Rp. 82.616.950
  - Prosentase Realisasi Keuangan :93.06%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 93.06%
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Anggaran : Rp.66.632.500
  - Realisasi : Rp. 48.123.750
  - Prosentase Realisasi Keuangan :72.22%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 72.22%
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Anggaran : Rp. 6.068.800
  - Realisasi : Rp. 5.816.100
  - Prosentase Realisasi Keuangan :95.84%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 95.84%

- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Anggaran : Rp. 6.000.000
  - Realisasi : Rp. 6.000.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :100.00%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100.00%
  
- i. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
  - Anggaran : Rp. 4.200.000
  - Realisasi : Rp. 3.850.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :91.67%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 91.67%
  
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - Anggaran : Rp. 315.000.000
  - Realisasi : Rp. 314.955.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan : 99.99%
  - Prosentase Realisasi Fisik :99.99%

**2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :**

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Anggaran : Rp. 5.000.000
  - Realisasi : Rp. 5.000.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :100.00%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%
  
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Anggaran : Rp. 50.000.000
  - Realisasi : Rp. 46.100.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :92.20%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%
  
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - Anggaran : 17.000.000

- Realisasi : 16.555.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan : 97.38%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Anggaran : Rp. 121.200.000
  - Realisasi : Rp. 84.617.600
  - Prosentase Realisasi Keuangan : 69.82%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 69.82%
- e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Anggaran : Rp. 33.450.000
  - Realisasi : Rp. 13.340.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan: 39.88%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 39.88%

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Diklat Prajabatan Golongan II dan III
- Anggaran :Rp.873.737.800
  - Realisasi : Rp.860.782.300
  - Prosentase Realisasi Keuangan :98.52%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Anggaran : Rp.71.650.000
  - Realisasi : Rp. 64.757.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan : 90.38%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 90.38%
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Anggaran : Rp.65.150.000
  - Realisasi : Rp.62.250.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :95.55%

- Prosentase Realisasi Fisik : 95.55%

## **5. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

### **Kegiatan :**

#### a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur

- Anggaran : Rp. 104.030.000
- Realisasi : Rp. 95.680.000
- Prosentase Realisasi Keuangan : 91.97%
- Prosentase Realisasi Fisik : 63.75%

#### b. Penyusunan Data Dan Informasi Kepegawaian

- Anggaran : Rp. 83.750.000
- Realisasi : Rp. 76.221.700
- Prosentase Realisasi Keuangan : 91.01%
- Prosentase Realisasi Fisik : 0%

#### c. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Anggaran : Rp. 198.084.630
- Realisasi : Rp. 188.763.400
- Prosentase Realisasi Keuangan : 95.29%
- Prosentase Realisasi Fisik : 100%

#### d. Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat

- Anggaran : Rp. 156.900.000
- Realisasi : Rp. 131.176.000
- Prosentase Realisasi Keuangan : 83.60%
- Prosentase Realisasi Fisik : 100%

#### e. Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama

- Anggaran : Rp. 734.750.000
- Realisasi : Rp. 691.053.640
- Prosentase Realisasi Keuangan : 94.05%
- Prosentase Realisasi Fisik : 100%

## 6. Program Peringatan Motivasi Anggota Korpri

- a. Peringatan Korps Pegawai Republik Indonesia
  - Anggaran : Rp. 49.725.000
  - Realisasi : Rp. 49.709.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :99.97%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%
- b. Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI
  - Anggaran : Rp. 78.450.000
  - Realisasi : Rp. 78.097.000
  - Prosentase Realisasi Keuangan :99.55%
  - Prosentase Realisasi Fisik : 100%

Dari Data diatas terlihat Realisasi Keuangan untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **93.55%**.

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 10 Kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 670.026.870,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 635.102.435,- atau realisasi sebesar 94,76%. Adapun output yang dihasilkan meliputi penyediaan surat menyurat, listrik, air, alat tulis, dan barang cetakan.

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur.untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 226.650.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 165.612.600,- atau 73,07%. Adapun output yang dihasilkan

adalah tersedianya perlengkapan kantor dan terpeliharanya gedung kantor serta kendaraan dinas

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 10 buku/laporan, dan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 5 buku/dokumen. Dengan anggaran yang dialokasikan Rp. 138.800.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 127.007.000,- atau 92,84%

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada tahun 2017 salah satu program prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan dengan output kegiatan antara lain:

- Terlaksananya penjatuhan hukuman indisipliner sebanyak 1 kasus dan penerbitan izin perceraian sebanyak 8 Kasus.
- Terlaksananya Baperjakat dan pelantikan pejabat sebanyak 453 orang.
- Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka sebanyak 37 orang.
- Terlaksananya pengiriman peserta diklat fungsional, teknis, manajemen dan lainnya pola kontribusi sebanyak 1 orang, penerbitan SK tugas belajar sebanyak 17 orang dan SK izin belajar sebanyak 15 orang serta pembekalan jabatan tinggi pratama sebanyak 34 orang.
- Penyusunan buku Daftar Urut Kepangkatan (DUK), struktur organisasi, bezzeting/formasi sebanyak 0 buku/dokumen. Adapun pada kegiatan penyusunan Data Informasi Kepegawaian dengan out put yang tidak terealisasi tersebut dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian data dasar dan informasi kepegawaian secara administrasi dari

setiap OPD sehingga penyusunan buku tidak dapat terlaksana, akan tetapi pelaksanaan penyusunan data tersebut tetap di update dan di validasi.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 873.737.800,- dengan tingkat realisasi Rp. 860.782.300,- atau 98,52%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut terselenggaranya prajabatan gol II dan III, dengan rician peserta prajabatan gol II sebanyak 24 orang dan gol III 69 orang dengan total peserta 93 orang.

6. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Solidaritas anggota KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peringatan Korps Pegawai Republik Indonesia dan fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 128.175.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 127.806.000,- atau 99,71%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut terlaksananya HUT korpri.

### **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

Adapun permasalahan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 226.650.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 165.612.600,- atau 73,07%, hal ini dikarenakan terdapat 2 kegiatan dengan daya serap anggaran yang rendah antara lain:

- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 33.450.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 13.340.000,- atau 39,88%, hal ini dikarenakan tingkat kerusakan peralatan gedung kantor di

BKPSDM relatif kecil sehingga kebutuhan dana perbaikan komputer, laptop, printer, AC dan peralatan lainnya sehingga anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan tersebut relative rendah

- b. Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 121.200.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 84.617.000,- atau 69,82%, alokasi pendanaan bahan bakar minyak kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit tahun 2017, hanya digunakan 1 unit pada periode bulan Januari s/d Agustus 2017 hal ini dikarenakan belum tersedianya 1 unit kendaraan dinas operasional BKPSDM pada bulan Januari s/d Agustus 2017.

b. Solusi

Adapun solusi dari permasalahan diatas, untuk mengevaluasi dan menginventarisir kembali tingkat kerusakan peralatan gedung kantor dan kebutuhan bahan bakar minyak roda 4 untuk tahun yang akan datang.

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2012/1	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2018	
					Target Renja BKPSDM tahun 2017	Realisasi Renja BKPSDM tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran									
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.	Penyediaan Jasa	Administrasi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%

	Administrasi Keuangan	keuangan yang tertib						12 Bulan			
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	60,00%	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	60 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%					
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%					
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan 1 tahun	60 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%					
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%					
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	60 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	60,00%					
10.	Rapat-rapat	Tersedianya	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%	

	Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi								
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	- Printer 5 Unit - Komputer 3 unit	- Printer 5 Unit - Komputer 3 unit	100%	25 Unit 1 set 2 Buah 2 Buah	Printer 5 Unit Komputer 3 unit 25 Unit 1 set 2 Buah	100%	
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	130 uit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	40 Unit	30,77%	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	190 unit	66 Unit	66 Unit	100%	49 Unit	115 Unit	60,53%	
	<b>Program</b>									

15	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pelayanan prima yang baik	250 Stel PDH					82 Stel PDH	82 Stel PDH	32,80%
16	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	24 Bulan	60,00%
17	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	24 Bulan	60,00%
18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas	41 Orang					10 Orang	10 Orang	24,39%

	Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat								
19	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur CPNS	854 Orang		94 Orang	93 Orang	98,94%	93 Orang	186 Orang	21,66%
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>									
20	Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Terlaksananya pengangkatan, kenaikan, Inpassing, pembebasan, pemberhentian dan uji kompetensi PNS dalam jabatan fungsional	950 Orang					261 Orang	261 Orang	27,47%
21	Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah PNS yang naik pangkat - Terlaksananya pelantikan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural - Terlaksananya Mutasi PNS	1800 Orang 100 Orang 50 Orang	753 Orang 134 Orang 100 Orang				600 Orang 100 Orang 50 Orang	1353 Orang 234 Orang 150 Orang	75,17%
22	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	38 Orang	3 Orang	37 Orang JPT Pratama	37 Orang JPT Pratama	100,00%	4 Orang	44 Orang	115,79%

23	Pratama Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	2000 Orang					1050 Orang	1050 Orang	52,50%
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (PP 53 tahun 2010)	356 Orang 44 OPD	10 Orang	5 Kasus	8 Kasus	100,00%	112 Orang dan 44 OPD	122 Orang 44 OPD	34,27%
25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1630 Orang	18 Orang				406 Orang	424 Orang	26,01%
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang mutakhir	180 Buku		30 Buku	0 Buku	0,00%	50 Buku	50 Buku	27,78%
27	Sistem Aplikasi Pelayanan	Terlaksananya pengembangan dan	60 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	60,00%

	Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 tahun 2010)								
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	190 Orang		5 Orang	1 Orang	20,00%	45 Orang	46 Orang	24,21%
					20 Tugas Belajar	17 Orang	85,00%		17 Orang	
					30 Izin Belajar	15 Orang	50,00%		15 Orang	
29	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat	Tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	550 Orang					300 Orang	300 Orang	54,55%
30	Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat	- Jumlah pengangkatan/ promosi PNS dalam jabatan Administrator dan Pengawas - Jumlah PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas - Jumlah Kenaikan Pangkat	1200 Orang	134 Orang	200 Orang	453 Orang			587 Orang	48,92%
			100 Orang	100 Orang	100 Orang					
			500 Orang	600 Orang	500 Orang					
	<b>PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI</b>									
31	Peningkatan HUT Korps Pegawai	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

	Republik Indonesia	KORPRI								
32	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI	Terlaksananya Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI	15 Kasus	3 Kasus	5 Kasus	100,00%	3 Kasus	6 Kasus	40,00%	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 3 (tiga) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan.

Dari segi anggaran dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada umumnya dapat terserap rata-rata untuk setiap kegiatan lebih dari 85% dari total anggaran yang tersedia, sedangkan sisanya yang tidak terserap disebabkan kurangnya mengevaluasi aset yang perlu pemeliharaan. Permasalahan yang sering timbul didalam penyerapan anggaran adalah dimana tidak terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan penyerapan, Adapun fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh tiap-tiap Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang biasa didokumentasikan dalam dokumen-dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaksanaan penyerapan dengan rencana jadwal penyerapan.

Untuk lebih detilnya tentang Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada table Pencapaian Kinerja Pelayanan dan table Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah ini:

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	3	4	5	6	7	8					9	
1.	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
2.	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
3.	Administrasi keuangan yang tertib	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
4.	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	

5.	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
6.	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
7.	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan 1 tahun	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
8.	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
9.	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
10.	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	25 Unit 1 set 2 Buah	80%	- Printer 5 Unit - Komputer 3 unit	25 Unit 1 set 2 Buah	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	

11	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
12	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	20 Unit	22 Unit	20 Unit	20 Unit	22 Unit	100%	100%	100%	100%
13	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	49 Unit	100%	66 Unit	49 Unit	100,00%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan prima yang baik	82 Stel PDH	78 Stel PDH		82 Stel PDH	82 Stel PDH	100%		100%	100%
15	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
16	Tersusunnya laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10 Orang			10 Orang	10 Orang			100%	100%
18	Meningkatnya	93 Orang	67 Orang	94 Orang	93 Orang	30 Orang	100%	99%	100%	100%

	sumber daya manusia Aparatur CPNS											
19	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	40 Orang					30 Orang				100%	
20	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI						40 Orang				100%	
21	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang					40 Orang				100%	
22	Jumlah PNS yang naik pangkat						250 Orang				100%	
23	Terlaksananya pengangkatan, kenaikan, Inpassing, pembebasan, pemberhentian dan uji kompetensi PNS dalam jabatan fungsional	261 Orang			261 Orang	400 Orang			80%		100%	
24	- Jumlah PNS yang naik pangkat	600 Orang	900 Orang		600 Orang	40 Orang		91%		100%	100%	

	- Terlaksananya pelantikan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	100 Orang				100 Orang						
	- Terlaksananya Mutasi PNS	50 Orang				50 Orang						
25	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	4 Orang	3 Orang	37 Orang JPT Pratama	4 Orang	4 Orang	100%	100%	100%	100%		
26	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	1050 Orang	500 Orang		1050 Orang	500 Orang			80%	100%		
27	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (PP 53 tahun 2010)	112 Orang dan 44 OPD	10 Kasus	5 Kasus	112 Orang dan 44 OPD	5 Kasus	100%	100%	100%	100%		
28	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	406 Orang			406 Orang	400 Orang			100%	100%		

29	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang mutakhir	50 Buku		30 Buku	30 Buku	50 Buku	40 Buku	100%	0%	100%	100%	
30	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 tahun 2010)	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	
31	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	45 Orang		20 Buku	5 Orang	45 Orang	50 Orang	100%	92%	100%	100%	
					20 Tugas Belajar 30 Izin Belajar							
32	Tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	300 Orang				300 Orang				100%	100%	
33	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI	100%			100%	100%	100,00%		100%	100%	100%	
34	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI						3 Kasus				100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM**

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang cukup mengedepankan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut, Sesuai dengan tugas pokoknya untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintah secara terencana, sistematis, bertahap konfrenship dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance, Sejalan dengan kebijakan Regional aparatur Negara di bidang pemerintahan yang secara substansif meliputi langkah dan upaya melalui penataan system kepegawaian, peningkatan pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas dan system pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan Good Governance dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan Responsibilitas pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap tuntutan dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang cepat dan jelas dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah

dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tentram dan sejahtera. Terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

TABEL 2.4  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2		3	5	6	6					
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				449.106.900	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				982.513.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.732.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4.332.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	149.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	52.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	86.080.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	91.580.000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	26.514.850	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	36.523.850	

5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	58.619.554	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	80.081.150
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	40.360.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.851.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6.000.000
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	2.960.496	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	4.200.000
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	90.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	661.585.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>166.104.972</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>428.680.200</b>

11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 Gedung Kantor	22.556.160	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	25 Unit 1 Set 2 Buah	168.830.200
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Tanjab Barat	Pelayanan Prima yang Baik	20 Unit	100.938.816	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	78.700.000
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tanjab Barat	Memperlancar Operasional Kegiatan	66 Unit	23.578.236	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Tanjab Barat	Pelayanan Prima yang Baik	20 Unit	144.800.000
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Tanjab Barat	Terehabilitasinya Gedung Kantor	12 Bulan	19.031.760	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tanjab Barat	Memperlancar Operasional Kegiatan	49 Unit	36.350.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>65.000.000</b>					
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	78 stel	65.000.000	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>28.700.000</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>87.391.650</b>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	82 stel	28.700.000
						<b>Program</b>				

16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan	57.391.650	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>142.620.750</b>
17	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan	30.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan		83.770.750
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>959.273.475</b>	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12 Bulan		58.850.000
18	Diklat Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peserta	10 Orang	120.000.000						
19	Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan	100%	80.000.000	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>376.962.850</b>
20	Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional tertentu	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu	100%	105.097.608						
21	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peserta	40 Orang	654.175.867	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peserta	10 Orang		172.272.000

	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>1.222.703.053</b>	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	200 Orang	204.690.850	
22	Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peserta	160 Org 160 Buku	60.000.000	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>					<b>2.102.553.250</b>
23	Kepangkatan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah PNS yang mengusulkan naik pangkat periode April dan Oktober	600 Orang	90.000.000	Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tanjab Barat	- Jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode April dan Oktober	600 Orang	174.235.000	
24	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka	4 Orang	224.969.501			- Pelaksanaan Pelantikan Pejabat dan Mutasi Pegawai	150 Orang		
						Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka	4 Orang	139.560.000	
25	Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Baperjakat dan Pelantikan	200 Orang	137.733.552						
26	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Kab. Tanjab Barat	Terbitnya pengelolaan pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	100%	95.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Kab. Tanjab Barat	Terbitnya pengelolaan pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	1050 Orang	61.750.000	
						Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS	Kab. Tanjab Barat	- Terlaksananya Pelayanan Konseling dan	12 Kasus	213.258.250	

27	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya Pengetahuan PNS akan Peraturan-peraturan	4142 PNS	85.000.000	Kab. Tanjung Barat		Perkawinan PNS			
28	Tim Pertimbangan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjung Barat	Menurunnya jumlah tindakan Indisipliner PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10 Kasus	75.000.000			- Terlaksananya Pelayanan Pensiun PNS - Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS	100 Orang PNS 44 OPD		
29	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Kab. Tanjung Barat	Terlaksananya Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNS	100%	75.000.000	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Kab. Tanjung Barat	- Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD - Jumlah PNSD yang diambil Sumpah	190 orang 216 Orang	47.050.000	
30	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat	Tersusunnya Data dan Informasi Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat	250 Buku	90.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Muktahir (Update)	50 Buku	71.000.000	
31	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat	Terciptanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang Ergonomis dan Muktahir	20 Set Komputer, Printer dan Jaringan Internet 100 Buku	140.000.000	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 Tahun 2010)	12 Bulan	97.620.000	

						Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	45 Orang	154.758.250	
32	Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Pengetahuan tentang Kepegawaian	160 Orang 160 Buku	75.000.000	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Inspacing, Pembebasan dan Pemberhentian dan Uji Kompetensi PNS dalam Jabatan Fungsional	261 Orang	170.011.750	
33	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	40 Orang	75.000.000						
	<b>PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI</b>				<b>140.000.000</b>						
34	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Kab. Tanjab Barat	Terselenggaranya kegiatan HUT KORPRI	100%	70.000.000	Pengadaan CPNS dan PPPK	Kab. Tanjab Barat	Terpenuhinya formasi CPNS dan PPPK Kab. Tanjab Barat	350 Orang	900.000.000	
						Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya penyampaian LHKPN Tanjab Barat	300 Orang	73.310.000	
35	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum	Kab. Tanjab Barat	Terciptanya Fasilitas Konsultasi Bantuan	100%	70.000.000						

bagi Anggota ASN/ KORPRI	Hukum bagi Anggota ASN/ KORPRI									
					<b>PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI</b>					<b>61.900.000</b>
					Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Kab. Tanjab Barat	Terselenggarany a kegiatan HUT KORPRI	100%		61.900.000
				<b>3.089.580.050</b>						<b>4.123.930.050</b>
										-

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan suatu kesatuan dalam membantu tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM**

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. adapun tujuan

yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.
S.3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 mempunyai beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan – kegiatan untuk Tahun 2019 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
17. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
18. Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
19. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
20. Penilaian Kinerja Aparatur
21. Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

22. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
23. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
24. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
25. Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
26. System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
27. Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
28. Kepangkatan
29. Penyusunan Pola Karir PNS
30. Uji Kompetensi Pejabat Administrator
31. Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
32. Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia

TABEL 3.3  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan lancar	BKPSDM	100%	969.600.000	APBD			1.066.560.000
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Bulan	6.000.000	APBD		12 Bulan	6.600.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan belanja jasa Telepon, Air dan Listrik	BKPSDM	12 Bulan	5.500.000	APBD		12 Bulan	6.050.000
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	BKPSDM	12 Bulan	97.000.000	APBD		12 Bulan	106.700.000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	38.000.000	APBD		12 Bulan	41.800.000

5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPSDM	12 Bulan	85.000.000	APBD		12 Bulan	93.500.000
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	55.000.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	6.600.000	APBD		12 Bulan	7.260.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	12 Bulan	6.000.000	APBD		12 Bulan	6.600.000
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minuman rapat tamu	BKPSDM	12 Bulan	5.500.000	APBD		12 Bulan	6.050.000
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BKPSDM	12 Bulan	670.000.000	APBD		12 Bulan	737.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>		<b>246.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>259.600.000</b>
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	100%	10.000.000	APBD		100%	40.000.000
12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BKPSDM	100%	50.000.000	APBD		100%	30.000.000
13.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional	BKPSDM	22 Unit	150.000.000	APBD		22 Unit	150.000.000

14.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKPSDM	100%	36.000.000	APBD		100%	39.600.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>		<b>31.500.000</b>	<b>APBD</b>			<b>34.650.000</b>
15.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	82 Stel	31.500.000	APBD		82 Stel	34.650.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>165.000.000</b>
16.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	BKPSDM	12 Bulan	90.000.000	APBD		12 Bulan	99.000.000
17.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	BKPSDM	12 Bulan	60.000.000	APBD		12 Bulan	66.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural</b>	<b>BKPSDM</b>		<b>3.245.300.000</b>	<b>APBD</b>			<b>899.270.000</b>
		<b>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>							-
18.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	BKPSDM	2 Orang 3 Orang 5 Orang	150.000.000	APBD		2 Orang 3 Orang Orang	5 150.000.000

19.	Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI	BKPSDM	- 10 JPT Pratama - 10 Administrator - 10 Pengawas 40 Orang	495.700.000	APBD	- 10 JPT Pratama Administrator - 10 Pengawas	545.270.000
20.	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	BKPSDM		130.000.000	APBD		143.000.000
21.	Diklat Prajabatan Golongan II dan III	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	BKPSDM	200 Orang	1.860.000.000	APBD	200 Orang	
22.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	BKPSDM	30 Orang	609.600.000	APBD	30 Orang	61.000.000
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan</b>	<b>BKPSDM</b>		<b>2.315.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>2.452.500.000</b>
		<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi</b>						
		<b>Persentase Data ASN yang dimutakhirkan</b>						
		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
23.	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	BKPSDM	150 Orang	130.000.000	APBD	100 Orang	130.000.000

24.	Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja	BKPSDM	150 Orang	110.000.000	APBD		150 Orang	110.000.000
25.	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Berkualitas dan Profesionalisme	BKPSDM	4 Orang	140.000.000	APBD		4 Orang	150.000.000
26.	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Jumlah berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN Dan Penghargaan ASN	BKPSDM	1100 Orang	70.000.000	APBD		1100 Orang	70.000.000
27.	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	BKPSDM	45 OPD dan 800 Orang PNS	130.000.000	APBD		45 OPD dan 800 Orang PNS	135.000.000
28.	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan jabatan, Inpassing, pembebasan, pemberhentian dan uji kompetensi PNS dalam jabatan fungsional	BKPSDM	400 Orang Sumpah PNS	47.000.000	APBD		400 Orang	47.000.000
29.	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat	Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat yang tersedia	BKPSDM	50 Buku	71.000.000	APBD		50 Buku	71.000.000
30.	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjung Barat	Data Aparatur yang ter Up-Deting	BKPSDM	12 Bulan	97.000.000	APBD		12 Bulan	98.000.000

31.	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar	BKPSDM	45 Orang	145.000.000	APBD		60 Orang	145.000.000
33.	Kepangkatan	Jumlah PNS yang naik pangkat	BKPSDM	800 Orang	60.000.000	APBD		250 Orang	70.000.000
34.	Penyusunan Pola Karir ASN	Jumlah Pola Karir yang tersusun sesuai dengan kompetensi	BKPSDM	4180 Jbt	80.000.000	APBD		4180 Jbt	80.000.000
35.	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II	BKPSDM	80 Orang	50.000.000	APBD		80 Orang	55.000.000
36.	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	Jumlah ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dan Kualifikasi	BKPSDM	115 Orang	130.000.000	APBD		55 Orang	140.000.000
37.	Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan melalui Manajemen Pelayanan BKPSDM Satu Pintu	BKPSDM	100%	65.000.000	APBD		100%	71.500.000
38.	Pengadaan CPNSD dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK Kab. Tanjung Barat yang tersedia	BKPSDM	350 Formasi	900.000.000	APBD		350 Formasi	990.000.000
37.	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Penetapan Perubahan Status Kepegawaian berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan	BKPSDM	126 Orang	90.000.000	APBD		100 Orang	90.000.000

	<b>PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI</b>	<b>Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI</b>	<b>BKPSDM</b>		<b>150.345.000</b>	<b>APBD</b>			<b>70.000.000</b>
	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri dan LKBH KORPRI	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitas konsultasi bantuan hukum bagi Anggota Korpri	BKPSDM	3 Kasus	80.345.000	APBD		3 Kasus	88.379.500
40.	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI	BKPSDM	100%	70.000.000	APBD		100%	70.000.000
					<b>7.107.745.000</b>				<b>4.947.580.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

#### **1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- Penilaian Kinerja Aparatur

- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
- System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengadaan CPNS dan PPPK
- Kepangkatan
- Penyusunan Pola Karir PNS
- Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyusunan Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II
- Uji Kompetensi Pejabat Administrator
- Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
- Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
- Diklat Prajabatan Golongan II dan III
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri
- Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

## **3. Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI
- Peringatan KORPS Pegawai Republik Indonesia

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 maka penetapan prioritas pembangunandiharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ENCEP JARKASIH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19701201 199009 1 001